

**DRAFT REVISI
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(REVISI RENSTRA PD)
TAHUN 2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Moch. Seruji No. 03 Telp./Fax. (0338) 678774
SITUBONDO – 68312

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/ /431.301.1/2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SITUBONDO TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor

- 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2015;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRASKPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021**

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RESNTRASKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai dengan akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun awal 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pasal 3

- (1) RENSTRA tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RENSTRA Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, STRATEGIS, TUJUAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi SKPD

4.2 Misi SKPD

4.3 Tujuan

4.4 Strategi

4.5 Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program SKPD

5.2 Program Lintas SKPD

5.3 Program Lintas Kewilayahan

5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- (3) Urutan secara rinci RENSTRA Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 3, dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban menjabarkan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD (Renja SKPD).

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : _____

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681127 198903 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga penyusunan Draft buku revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana Perubahan RPJMD yang saat ini sedang dibahas di DPRD Kabupaten Situbondo di dalam revisi renstra ini berisi penyesuaian indikator kinerja yang smart sebagaimana asistensi yang dilakukan oleh Kemenpan RI dan berdasarkan penyesuaian yang di revisi di RPJMD Perubahan Tahun 2019.

Pada buku draft revisi Renstra ini memuat Indikator kinerja utama yang dilakukan penajaman tentang tupoksi Bappeda yang memuat upaya pencapaian target utama sampai pada tahun 2021. Perubahan penentuan target utama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukan untuk merubah target capaian visi misi Kepala Daerah akan tetapi untuk memudahkan pencapaian target tersebut secara lebih terstruktur, terarah dan smart.

Semoga dengan disusunya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 Bappeda Kabupaten Situbondo lebih konsisten dalam mengawal perencanaan Pembangunan Daerah secara terstruktur, terencana dan berhasil mendapatkan target yang diharapkan.

Situbondo, 29 Juli 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19681127 198903 1 007



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK PENYUSUNAN RENSTRA	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	2
1.5 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2 Sumber Daya SKPD	6
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	20
BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	53
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	53
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	54
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	56
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	61
4.1 Visi SKPD	61
4.2 Misi SKPD	61
4.3 Tujuan	62
4.4 Strategi	63
4.5 Kebijakan	66
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	73
5.1 Program SKPD	73
5.2 Program Lintas SKPD	74
5.3 Program Lintas Kewilayahan	75

5.4	Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan	75
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	110

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

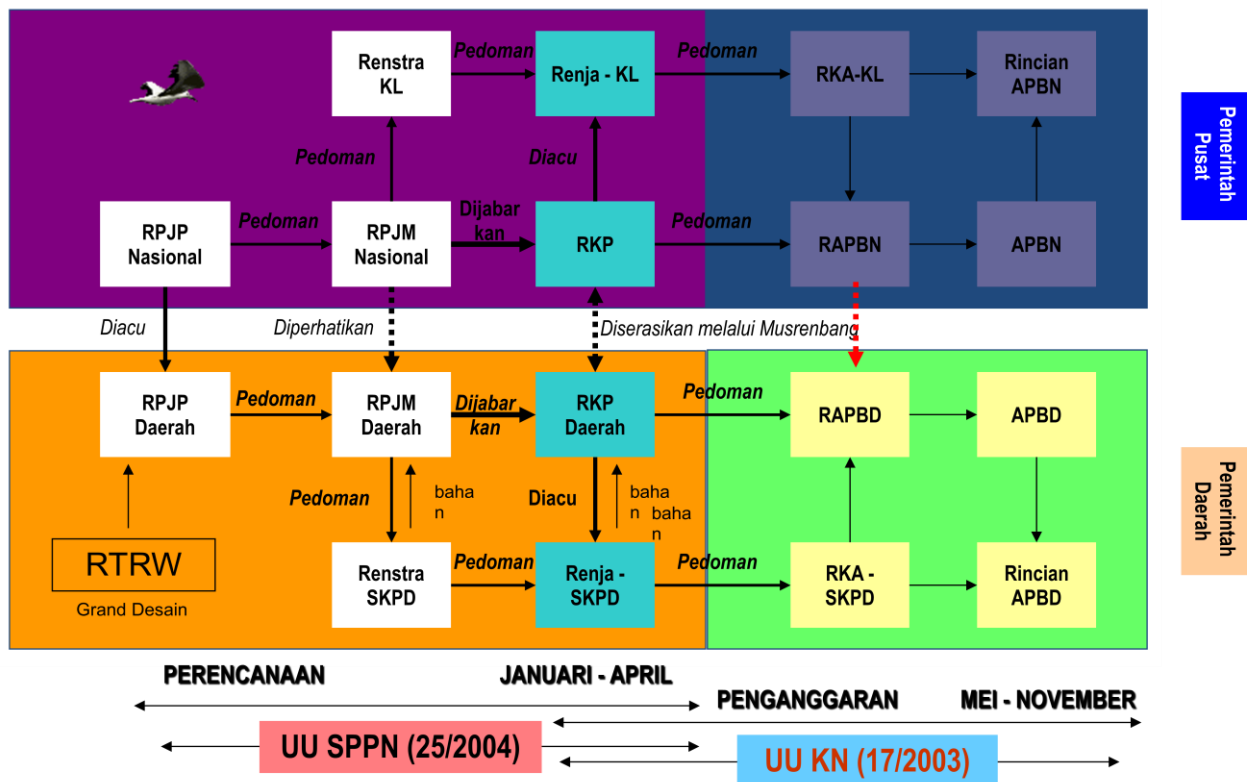
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 (selanjutnya disebut Renstra SKPD BAPPEDA) pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Bappeda, maka disusunlah Revisi Renstra Bappeda sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Revisi Revisi Renstra Bappeda memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2016 – 2021) sebagaimana arahan dari kemenpan RB yang di sinkronisasi dengan penyusunan SAKIP. Penyusunan Revisi Renstra Bappeda merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2016 – 2021 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan Revisi Renstra Bappeda merupakan

satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Situbondo, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Bappeda (Renja-Bappeda) yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Situbondo.



1.2 LANDASAN HUKUM

Revisi Renstra Bappeda disusun atas dasar :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Penyusunan Revisi Renstra Bappeda, dimaksudkan untuk mempertajam Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk menegaskan peran dan kedudukan Bappeda yang lebih dinamis dan terukur untuk pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban.

2. Tujuan :

Penyusunan Revisi Renstra Bappeda bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Bappeda dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika naskah Revisi Renstra Bappeda 2016 - 2021 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Revisi Renstra Bappeda, fungsi Revisi Renstra Bappeda dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Revisi Renstra Bappeda, keterkaitan Revisi Renstra Bappeda dengan RPJMD, renstra K/L dan renstra provinsi/ kabupaten/ kota dan dengan renja Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Memuat dasar- dasar hukum yang mendasari pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Alasan yang mendasari penyusunan Renstra dan hasil yang di harapkan dari penyusunan Renstra tersebut.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat tentang metode penulisan, data-data yang di sajikan serta korelasinya dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD**

Memuat tentang Tupoksi Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), struktur organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut.

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat segala hal yang merupakan kemampuan Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan tolak ukur yang merupakan target yang akan dilaksanakan selama kurun waktu yang telah ditetapkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Membahas tentang isu-isu masa kini yang akan di hadapi Bappeda didalam menjalankan tugas pokok dan Fungsinya .

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

BAB 3**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD**

Analisa isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan penyusunan renstra sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Karena dengan analisis yang tepat mengenai evaluasi permasalahan Tahun – tahun sebelumnya diharapkan akan menjadi bahan evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Hal ini disebabkan perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak dapat diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan – permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Cukup signifikannya ketidak sesuaian antara dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan sehingga memungkinkan terjadinya kesimpangsiuran dokumen perencanaan (inkosistensi) yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak tepat dan tidak terarah, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD ;

- b. Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan, terlihat dari implementasinya yang sering tumpang tindih, sehingga diperlukan revisi terhadap suatu kegiatan ;
 - c. Dalam penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan tidak berpedoman pada Dokumen RPJMD sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak konsisten antar dokumen perencanaan ;
 - d. Komitmen dan Ketaatan terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun ;
2. Belum optimalnya hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan acuan di dalam penyusunan rencana kegiatan :
- a. Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Terbukti dari belum sepenuhnya hasil pengendalian dan evaluasi yang dipakai sebagai salah satu bahan bagi umpan balik (feed back) untuk perencanaan selanjutnya ;
 - b. Dengan Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut Penguatan Peran Bappeda dalam Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;
 - c. Belum optimalnya data mengenai hasil pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah.

Satu kondisi / kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan menutupi faktor kekurangan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengidentifikasi arah kebijakan, serta menentukan arah pelayanan Bappeda di masa yang akan datang. Hal ini diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan dalam dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Masyarakat Situbondo Yang Madani, Mandiri, Serta Lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan

Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2016-2021. Secara filosofis visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

1. Madani

Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

2. Mandiri

Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Situbondo dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain.

3. Lebih Beriman

Pada pokok pemikiran ketiga ini mengandung makna kondisi dimana keyakinan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Situbondo kepada Tuhan Yang Maha Esa lebih meningkat.

4. Sejahtera

Sejahtera mempunyai makna suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan dasar dapat terpenuhi serta kesempatan sosial bisa dimaksimalkan. Jadi menunjukkan kondisi dimana permasalahan sosial masyarakat Kabupaten Situbondo sudah dikelola dengan baik dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Situbondo sudah terpenuhi, baik kebutuhan lahir dan batin.

5. Berkeadilan

Berkeadilan mempunyai makna suatu keadaan atau kondisi dimana manusia mempunyai keadilan. Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antarmanusia, yang dimana seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berprestasi, dan aktif dalam pembangunan
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan
4. Mengembangkan sumber daya alam yang memiliki daya dukung terhadap pembangunan
5. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Adapun tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan Visi misi tersebut adalah :

Tugas Bappeda:**Misi ke 5 : Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan**

Dalam misi ini tugas Bappeda adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang penelitian dan perencanaan, serta mengkoordinasikan aspek – aspek perencanaan dari seluruh satuan organisasi / instansi yang ada di Kabupaten Situbondo, melakukan koordinasi perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi, pelaporan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Fungsi Bappeda:

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pelaksanaan kegiatan penelitian, kajian, analisa data dalam rangka Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah
4. Pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan
5. Perumusan kebijakan teknis perencanaan
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan dalam lingkup Badan
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

Tugas dan fungsi tersebut merupakan penjabaran dari tupoksi Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai 2 tugas utama yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif
2. Program Pengembangan dan Penelitian

3.3

TELAHAAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Dalam penyusunan Renstra dibutuhkan kesesuaian dengan Renstra Lembaga yang lebih tinggi, dalam hal ini dibutuhkan kesesuaian antara Renstra Bappeda dengan Renstra Bappeprov dan Renstra Bappenas.

Penyesuaian Renstra dengan lembaga pemerintahan yang lebih tinggi diharapkan meningkatkan optimalisasi sumber daya dan *out comes* yang dihasilkan melalui keselarasan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra.

Rencana strategis Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tahun 2015-2020 pada dasarnya memperhatikan :

- a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L;
- b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;
- c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;
- d. Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas Presiden;
- e. Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome) program K/L; Sumberdaya yang diperlukan.

Bila diamati secara seksama, maka tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, propinsi maupun kabupaten selama lima tahun ke depan, pada dasarnya memiliki keselarasan yang kokoh, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kembangsinergitas dalam perencanaan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang pokok, yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pengembangan penduduk Kabupaten Situbondo diarahkan mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat mengkonsentrasikan Program – program pembangunan yang dilaksanakan di daerah sasaran sesuai dengan Peraturan Rencana Tata Ruang wilayah. Pengkonsentrasian pola pengembangan penduduk diharapkan mampu membentuk sebuah sistem baku di wilayah kabupaten situbondo sehingga ke depannya sistem pembangunan wilayah dapat terstruktur dengan baik dan rapi, menghasilkan output yang maksimal dan memudahkan evaluasi serta pengawasan.

Rencana Tata Ruang Wilayah secara umum bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup, melestarikan fungsi lindung bagi kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya serta menghindari berbagai kegiatan atau usaha di daerah atau kawasan rawan bencana.

Berbagai Rencana Tata Ruang Wilayah dalam menetapkan peruntukannya, memperhatikan beberapa aspek, antara lain perkembangan sosial – kependudukan, prospek pertumbuhan ekonomi, daya dukung fisik dan lingkungan, daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan, kondisi fisik dasar dan daya dukung lahan, perkembangan lahan eksisting dan kecenderungan perkembangan wilayah kota, batas – batas kawasan yang dilindungi serta perkembangan dan rencana pembangunan wilayah sekitar.

Dengan pembentukan sistem pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah tentunya sistem transportasi dibutuhkan dalam mendukung pengembangan daerah yang selayaknya mendapat prioritas dalam Renstra sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah tidaklah menjadi separator atau pemisah yang menjadi beban permasalahan bagi Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat terselesaikan selama periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Pemahaman

terhadap isu strategis akan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda secara efektif dan efisien dalam upaya optimalisasi perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan identifikasi permasalahan – permasalahan dan hasil telaahan lainnya, dapat disimpulkan isu strategis yang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi dan standarisasi kebutuhan unit kerja sangatlah penting untuk menunjang aktivitas kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil - hasil penelitian sehingga menjadi lebih terarah dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan dicapai, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting agar jumlah SDM yang dibutuhkan juga terpenuhi serta memiliki potensi dan kapabilitas sesuai tugas dan fungsinya ;
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran melibatkan banyak pihak sehingga mempermudah proses evaluasi ;
3. Produk – produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan, terukur dan berdaya guna untuk mencapai visi dan misi Bappeda. Dokumen Perencanaan Daerah yang dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan rencana – rencana kerja dari SKPD yang didalamnya berisi usulan dari berbagai stakeholder maupun dari berbagai wilayah. Kondisi akhir – akhir ini belum semua semua sektor telah memiliki sistem perencanaan yang baik dan terintegrasi ;
4. Hasil kajian atau penelitian dan data – data statistik, diharapkan dapat memberikan manfaat dan informatif dalam memberikan dukungan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
5. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran karena belum optimalnya implementasi kebijakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian hasil yang diharapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga memunculkan deviasi cukup tinggi antara usulan dengan penetapannya ;
6. Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah kabupaten ;

7. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB 4**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

Tujuan jangka menengah Bappeda merupakan penjabaran dari sasaran pada tabel 8.1 RPJMD yang di sepakati sebagai sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut merumuskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda adalah :

Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut dimaksudkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan daerah adalah prioritas utama dalam tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Diharapkan peran Bappeda sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dapat terwujud dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan kabupaten yang transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Situbondo yang cerdas dan bermartabat.

Indikator tujuan yang digunakan dalam rangka menilai peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah **“capaian nilai pangripta”**. Hal ini di pilih karena pangripta adalah penghargaan tingkat nasional tertinggi yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan nasional. Diharapkan dengan penentuan standar yang tinggi tersebut bappeda bisa lebih meningkatkan lagi kualitas perencanaannya.

Untuk mendukung perwujudan tujuan organisasi, dan untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Bappeda Kabupaten Situbondo

menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang menjadi sasaran dalam tabel 4.1 tentang Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda dalam 5 tahun kedepan.

Adapun sasaran dan indikator sasaran tersebut adalah:

Sasaran ke-1 :

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah

Pernyataan sasaran pertama ini merupakan komitmen Bappeda untuk menyelaraskan semua dokumen perencanaan. Dimana yang dimaksud selaras adalah kesesuaian, mendukung dan merupakan satu garis lurus yang mendukung visi dan misi Bupati sebagaimana yang sudah di gariskan dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Sasaran ini juga berorientasi pada hasil, yang mana dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik salah satu prasyarat untuk mengukur perencanaan adalah dengan melihat dari hasil capaian program pembangunan daerah apakah meningkat atau tidak setiap tahunnya. Dengan memantau hasil inilah kita dapat mengevaluasi apakah perencanaan yang sudah dibuat benar- benar dapat terealisasi dengan baik atautkah tidak. Bisa juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja dari Organisasi Perangkat daerah berhasil atau tidaknya. Lebih jauh merupakan kontrol perencanaan apakah tepat sasaran atautkah tidak.

Hal ini sangat penting mengingat dengan pencapaian program perencanaan yang baik diharapkan segala hal yang sudah menjadi tujuan dan harapan perencanaan yang sudah di tetapkan sebelumnya dapat berhasil dengan baik.

Sasaran Meningkatkan Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah ini dijabarkan dengan 4 indikator sasaran yaitu :

Indikator Sasaran ke- 1 :

prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target

Hal ini merupakan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi pencapaian program seluruh OPD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan dengan pencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Situbondo ke arah yang lebih baik.

Hal ini bisa dijabarkan dengan penelurusan hasil capaian program pertahunnya melalui data yang ada di LKPJ Bupati. Dalam LKPJ tersebut diperoleh data yang ada di tiap tiap OPD. Diharapkan dengan penelurusan dan kontrol yang baik akan meningkatkan pencapaian programnya di setiap tahunnya.

Indikator Sasaran ke-2 :

Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD

Pernyataan indikator sasaran yang kedua ini merupakan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi program antar dokumen perencanaan. Hal ini dirasa penting karena menjaga konsistensi program antar dokumen perencanaan berarti pula menjaga arah pembangunan Daerah sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Dokumen Perencanaan dan merupakan arah haluan yang akan dicapai Kabupaten Situbondo di masa yang akan datang. Konsistensi Program antar Dokumen Perencanaan membuat arah pembangunan dapat terarah, konsisten dan sesuai arah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD dan merupakan penjabaran tertulis dari Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Hal ini merupakan komitmen Bappeda dalam menjaga konsistensi pencapaian program seluruh OPD agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal. Diharapkan dengan pencapaian yang optimal akan meningkatkan kemajuan Situbondo ke arah yang lebih baik.

Agar perencanaan tata ruang tersebut dapat berjalan dengan baik maka harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :

a. Integratif :

Bahwa setiap perencanaan harus dilaksanakan secara koordinatif dan sinkron terhadap skala waktu, tingkat pemerintahan, tingkat kepentingan dan skala wilayah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);

b. Implementatif

Bahwa setiap perencanaan harus dapat dioperasionalkan dan menuju pada penetapan produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Indikator Sasaran ke-3 :

Prosentase renstra OPD yang Selaras dengan RPJMD

Pernyataan sasaran ketiga ini memiliki maksud bahwa Bappeda Situbondo bertekad untuk Meningkatkan Keselarasan renstra OPD dengan RPJMD dengan menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas dan berbobot tinggi sehingga dengan adanya keselarasan renstra OPD dengan RPJMD diharapkan akan membantu tiap tahap pembangunan yang ada di kabupaten Situbondo dan adanya kesesuaian antara perencanaan Kabupaten yang dalam hal ini dijabarkan melalui RPJMD dengan Perencanaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga di dapat asas perencanaan pembangunan yang selaras, sesuai dan terarah menurut target yang telah di tetapkan dari visi dan misi kepala daerah.

Melalui keselarasan yang tercipta antara RPJMD dan Renstra OPD diharapkan dapat menciptakan kesesuaian dokumen – dokumen perencanaan yang sampai pada tujuan mulia yaitu ketepatan sasarannya dalam menentukan skala prioritas pembangunan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan angka kesehatan penduduk dan berbagai macam isu-isu pembangunan yang muncul dalam rangka mewujudkan masyarakat Situbondo yang madani, mandiri, serta lebih beriman sejahtera dan berkeadilan.

Salah satu urusan yang merupakan tugas Bappeda adalah urusan penelitian dan pengembangan hal ini pada revisi renstra sebelumnya merupakan sasaran yang kedua dari Bappeda, setelah hasil di asistensi dengan tim dari kemenpan maka untuk sasaran penetian dan pengembangan tidak menjadi sasaran utama dari Bappeda tetapi tetap masuk kedalam dokumen perencanaan baik itu renstra maupun renja PD. Diharapkan hasil penelitian dan pengembangan dapat digunakan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Out put dari urusan penelitian dan pengembangan adalah kajian-kajian sebagai dasar dari penentuan kebijakan pembangunan. Penelitian dan pengembangan juga di harapkan mampu menggali potensi – potensi yang ada di Kabupaten Situbondo, menemukan solusi – solusi dan langkah – langkah yang inovatif di dalam penyelenggaraan pembangunan.

Rumusan kebijakan pembangunan daerah berarti sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil karena produk yang dihasilkan telah digunakan demi membuat kebikan bagi masyarakat di karenakan karena pentingnya Penelitian dan pengembangan di dalam perumusan kebijakan pembangunan maka Bappeda Kabupaten Situbondo menyandarkan segala kebijakan pembangunan daerah telah di kaji secara ilmiah melalui penelitian dan pengembangan sehingga segala kebijakan yang di hasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara konkrit.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan adalah :

- a. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang aspiratif, partisipatif dan bertanggung jawab ;
- b. Terwujudnya pengendalian program pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana yang telah digariskan di RPJPD, RPJMD, RKPD dan dokumen perencanaan lainnya;

Sedangkan sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Tersusunnya perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, antar daerah maupun perencanaan sektoral dan lintas sektor yang terintegrasi dan selaras dengan perencanaan provinsi dan nasional ;
- b. Tersusunnya data pembangunan ekonomi, sosial dan budaya daerah ;
- c. Tercapainya konsistensi antara agenda kegiatan yang diagendakan dalam APBD berikutnya dengan rencana yang telah disusun ;

1. Analisis Lingkungan

Sebelum menginjak pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Eksternal**1) Peluang**

- Keberadaan UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik ;
- Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan Kabupaten;
- Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro-pasar; serta, dukungan sistem fiskal dan pembiayaan yang responsif;
- Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kabupaten (APBD Provinsi, APBN dan swasta) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan;
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD.

2) Ancaman

- Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (Adanya potensi konflik yang tinggi);
- Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkret diperkirakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama;
- Tidak adanya investor yang masuk;
- Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu;
- Banyaknya kebijakan pemerintah Kabupaten yang terkoreksi;
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran;
- Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

b. Lingkungan Internal**1) Kekuatan**

- Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- SDM secara kuantitatif sangat memadai;
- Tersedianya prasarana-sarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan;

- Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda;
- Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk Perencanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, dan statistik pembangunan;
- Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

2) Kelemahan

- Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreativitas;
- Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relatif kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relatif kurang optimal);
- Penyiapan rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan;
- Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :

a. Strategi integrasi kebelakang dan pengembangan produk

- Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif warga kabupaten dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Situbondo.

- Selain itu, kaitan dengan pengembangan produk adalah dimaksudkan untuk memperbaiki produk perencanaan yang ada dan/atau mengembangkan produk perencanaan yang baru - baik yang akan maupun tanpa dilengkapi dengan kekuatan hukum - yang diharapkan dapat dijadikan pedoman/rujukan (road map) bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Organisasi lainnya (termasuk Masyarakat dan Dunia Usaha) sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki untuk dapat terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Situbondo.

b. Strategi integrasi kedepan

Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksudkan untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai eksekusi negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

c. Strategi penguatan kedalam

Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program

pembangunan; menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian; serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi

KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan, adalah sebagai berikut :

1. mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kota bersangkutan ;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah kab/kota serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rencana pembangunan yang terpadu, aspiratif dan berkelanjutan

BAB 6**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN****5.1 PROGRAM SKPD**

Berdasarkan arah tujuan, sasaran, Indikator sasaran, prioritas pembangunan Badan perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2016-2021 :

Tujuan : " Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah "

Indikator Tujuan : "Capaian Nilai Pangripta "

Sasaran : Meningkatkan Keselarasan dokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah

Indikator sasaran :

1. Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target ;
2. Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD ;
3. Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD.

dijabarkan dengan program :

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi ;
- c. Program Perencanaan Sosial Budaya ;
- d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- e. program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Secara Lengkap dijelaskan dalam tabel 5.1

5.2 PAGU INDIKATIF DAN INDIKASI SUMBER PENDANAAN

Pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo untuk menunjang terlaksananya program kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten dan Sumber pendanaan lainnya yang sah.

Tabel. Data Keuangan

ANGARAN	PAGU INDIKATIF		
	2008	2009	2010
APBD	Rp 579.176.444.869,73	Rp 610.752.953.118,34	Rp 754.883.967.566,24
BAPPEDA	Rp 7.674.718.220,00	Rp 6.960.024.970,93	Rp 7.665.925.315,27
	1.33 %	1.14 %	1.02 %

Sumber: Data Keuangan Kab. Situbondo tahun 2009

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2008-2010, APBD Kabupaten Situbondo tahun 2008 sebesar Rp. 579.176.444.869,73, tahun 2009 naik sebesar 10.54 % menjadi Rp 610.752.953.118,34 dan tahun 2010 naik sebesar 12.35 % menjadi Rp.754.883.967.566,24. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2008 sebesar Rp.7.674.718.220,00, tahun 2009 turun sebesar 0.90 % menjadi Rp. 6.960.024.970,93 dan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 1.02% menjadi Rp.7.665.925.315,27.

Berdasarkan data diatas kenaikan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo tidak sebanding dengan kenaikan APBD sehingga berdasarkan perbandingan antara APBD Kabupaten Situbondo dengan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo mengalami trend penurunan yaitu pada tahun 2008 anggaran Bappeda sebesar 1.33 % dari APBD, pada tahun 2009 turun menjadi 1.14 % dari APBD dan tahun 2010 turun menjadi 1.02 % dari APBD.

Pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya 1.02 % dari total APBD. Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian serius dibidang perencanaan pembangunan guna mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan daerah yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2011 – 2014, Anggaran untuk Bappeda, sebagai berikut :

- Tahun 2011, sebesar Rp. 6.095.941.500,-
- Tahun 2012, sebesar Rp. 8.561.486.000,-
- Tahun 2013, sebesar Rp. 9.651.264.900,-
- Tahun 2014, sebesar Rp. 13.030.346.175,-

dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk Bappeda naik setiap tahun dengan jumlah kenaikan, sebagai berikut :

- Tahun 2011 – 2012, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 2.465.544.500,-
- Tahun 2012 – 2013, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 1.089.778.900,-
- Tahun 2013 – 2014, anggaran Bappeda naik sebesar Rp. 3.379.081.275,-



BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang – bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing – masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Pada sektor publik, entitas seperti pemerintah, menghadapi sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut muncul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan yang sebagian besar berupa jasa pelayanan publik, sangat sulit diukur dan ditetapkan parameter pengukurannya baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas.

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut Visi dan Misi RPJMD dapat dikategorikan kedalam dua dimensi pembangunan yaitu dimensi utama pembangunan (sumber daya manusia dan sosial budaya) dan dimensi pendukung pembangunan (birokrasi, ekonomi, dan infrastruktur. Kedua jenis pembangunan tersebut menghasilkan sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memperkuat kawasan penyangga Second City untuk mengurangi disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean governance).
9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Situbondo

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat / aparat terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	1.134.420.097,00	100%	1.250.294.967,00	100%	1.592.484.800,00	100%	1.781.500.000,00	100%	1.769.500.000,00	100%	1.769.500.000,00	100%	9.297.699.864,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah fasilitasi Surat menyurat yang disediakan	2000 surat	3.150.000,00	2000 surat	2.398.000,00	2000 surat	3.600.000,00	2000 surat	4.000.000,00	2000 surat	4.000.000,00	2000 surat	4.000.000,00	10.000	21.148.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah terbayarkan rekening telepon, Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	279.578.299,00	12 bulan	181.641.503,00	12 bulan	219.960.000,00	12 bulan	181.000.000,00	12 bulan	181.000.000,00	12 bulan	181.000.000,00	12 bulan	1.224.179.802,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	2.517.500,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	21.853.800,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	25.350.000,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	30.000.000,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	30.000.000,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	30.000.000,00	8 kendaraan dinas roda 4, 21 roda 2	139.721.300,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	17 orang	182.191.000,00	17 orang	168.713.000,00	32 orang	400.000.000,00	32 orang	400.000.000,00	32 orang	400.000.000,00	32 orang	400.000.000,00	32 orang	1.950.904.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dalam 1 tahun	4 orang ; 30 unit	74.211.500,00	4 orang ; 30 unit	142.252.000,00	4 orang ; 30 unit	175.675.000,00	4 orang ; 30 unit	175.000.000,00	4 orang ; 30 unit	175.000.000,00		175.000.000,00		917.138.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis ATK yang disediakan	65 jenis	86.226.000,00	65 jenis	122.700.900,00	65 jenis	125.000.000,00	65 jenis	100.000.000,00	65 jenis	100.000.000,00	65 jenis	100.000.000,00	65 jenis	633.926.900,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diperlukan	17 jenis	119.283.350,00	17 jenis	77.250.600,00	17 jenis	68.485.000,00	17 jenis	69.000.000,00	17 jenis	69.000.000,00	17 jenis	69.000.000,00	17 jenis	472.018.950,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang tersedia untuk penerangan kantor	432 unit	11.856.000,00	432 unit	20.000.000,00	432 unit	20.074.800,00	432 unit	25.000.000,00	432 unit	25.000.000,00	432 unit	25.000.000,00	432 unit	126.930.800,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	8.965.000,00	60 eksemplar	10.000.000,00	60 eksemplar	15.000.000,00	60 eksemplar	18.000.000,00	60 eksemplar	18.000.000,00	60 eksemplar	18.000.000,00	60 eksemplar	87.965.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Makanan dan Minuman Tamu	12 rapat ; 3 jenis	26.566.000,00	12 rapat ; 3 jenis	42.668.100,00	12 rapat ; 3 jenis	27.390.000,00	12 rapat ; 3 jenis	27.500.000,00	12 rapat ; 3 jenis	27.500.000,00	12 rapat ; 3 jenis	27.500.000,00	12 rapat ; 3 jenis	179.124.100,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta dalam daerah dalam 1 tahun	152 rapat	299.675.448,00	152 rapat	391.817.064,00	152 rapat	383.200.000,00	152 rapat	400.000.000,00	152 rapat	400.000.000,00	152 rapat	400.000.000,00	152 rapat	2.274.692.512,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah penjaga perkantoran yang menjaga keamanan kantor						54.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		219.000.000,00	Bappeda	
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis (THL)	Jumlah personil THL yang mendapatkan Jasa Administrasi	5 THL	40.200.000,00	5 THL	69.000.000,00	5 THL	74.750.000,00	4 THL	75.000.000,00	4 THL	75.000.000,00	4 THL	75.000.000,00	4 THL	408.950.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang disediakan							55 stel	20.000.000,00	60 stel	20.000.000,00	60 stel	20.000.000,00	60 stel	60.000.000,00		
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website	persentase Website yang ter update dan menjadi sarana informasi publik							80%	27.000.000,00	90%	27.000.000,00	100%	27.000.000,00	100%	81.000.000,00		
Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu	persentase Aplikasi PPID pembantu yang selaras dengan PPID Utama							90%	35.000.000,00	90%	35.000.000,00	90%	35.000.000,00	90%	105.000.000,00		
Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang meningkat kemampuan kompetensinya							90%	90.000.000,00	90%	85.000.000,00	90%	85.000.000,00	90%	260.000.000,00		
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	Jumlah Fasilitasi PHBA yang dilaksanakan dengan baik							3 fasilitasi	25.000.000,00	3 fasilitasi	22.000.000,00	3 fasilitasi	22.000.000,00	3 fasilitasi	69.000.000,00		
Dukungan Pelaksanaan HARJAKASI	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Harjakasi yang dilaksanakan dengan baik							1 fasilitasi	25.000.000,00	1 fasilitasi	21.000.000,00	1 fasilitasi	21.000.000,00	1 fasilitasi	67.000.000,00		
															0,00		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
		Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	85%	861.055.347,00	85%	1.387.025.554,00	85%	951.315.000,00	90%	1.006.500.000,00	95%	934.515.000,00	95%	934.515.000,00	95%	6.074.925.901,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan							1 unit kendaraan roda tiga	35.000.000,00	1 unit sepeda motor	35.000.000,00	1 unit sepeda motor	35.000.000,00		105.000.000,00		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 gedung ; 12 bulan	12.651.000,00	1 gedung ; 12 bulan	24.500.000,00	1 gedung ; 12 bulan	7.500.000,00							1 gedung ; 12 bulan	44.651.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	11 jenis	205.785.000,00	11 jenis	527.100.000,00	11 jenis	223.880.000,00	11 jenis	420.000.000,00	11 jenis	348.000.000,00	11 jenis	348.000.000,00	11 jenis	2.072.765.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	5 jenis	82.136.000,00	5 jenis	9.500.000,00	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100.000.000,00	5 jenis	100.000.000,00	5 jenis	100.000.000,00	5 jenis	#VALUE!	Bappeda	Kab. Situbondo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Prosentase gedung kantor yang layak fungsi		49.968.000,00	2 gedung	247.915.000,00	2 gedung	142.500.000,00	2 gedung	100.000.000,00	2 gedung	100.000.000,00	2 gedung	100.000.000,00	2 gedung	740.383.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Penunjang Operasional UPTB Gedung Puspemas	Prosentase pemeliharaan gedung kantor UPTB Gedung Puspemas yang layak fungsi dan prosentase operasional UPTB gedung Puspemas yang berjalan baik		0,00	1 gedung ; 12 bulan	124.932.000,00										124.932.000,00		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas / operasional yang layak fungsi	39 unit	284.475.847,00	39 unit	368.622.554,00	40 unit	355.060.000,00	40 unit	251.500.000,00	40 unit	251.515.000,00	40 unit	251.515.000,00	40 unit	1.762.688.401,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang layak fungsi	6 jenis	30.791.500,00	6 jenis	35.000.000,00	6 jenis	22.000.000,00	6 jenis	30.000.000,00	6 jenis	30.000.000,00	6 jenis	30.000.000,00	6 jenis	177.791.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang layak fungsi	1 gedung	85.200.000,00	-	0,00	1 gedung	200.375.000,00	1 gedung	70.000.000,00	1 gedung	70.000.000,00	1 gedung	70.000.000,00	1 gedung	495.575.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pembangunan Papan Informasi/Balho	Jumlah papan informasi / Balho yang dibangun	1 unit	110.048.000,00	-	0,00										110.048.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan Papan Nama/ Neon Box	Jumlah papan nama / neon box yang diadakan		0,00	1 unit	49.456.000,00										49.456.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
															0,00		
Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase aparatur yang memiliki disiplin yang baik		39.850.000,00	90%	54.634.000,00	90%	17.480.000,00								111.964.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang perlengkapannya		11.550.000,00		11.000.000,00		17.480.000,00								40.030.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan pakaian kerja kemeja putih	Jumlah pakaian kerja kemeja putih yang diadakan		7.200.000,00		0,00		0,00								7.200.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		21.100.000,00		9.500.000,00		0,00								30.600.000,00		
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaian		0,00		34.134.000,00		0,00								34.134.000,00		
															0,00		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	prosentase aparatur yang meningkat kompetensinya		335.211.928,00	90%	466.904.720,00	90%	180.000.000,00								982.116.648,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang meningkatkan kompetensinya		256.111.020,00	10 Aparatur	282.068.720,00	10 Aparatur	100.000.000,00								638.179.740,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyelenggaraan In House Training tentang Perencanaan Daerah	jumlah in house training yang dilaksanakan		79.100.908,00	1 diklat	184.836.000,00	1 diklat	80.000.000,00								343.936.908,00	Bappeda	Kab. Situbondo
															0,00		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersaji dengan baik		98.384.000,00	90%	225.560.500,00	90%	134.218.000,00		1.696.900.000,00		1.296.900.000,00		1.296.900.000,00		4.748.862.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dengan baik		16.596.500,00	1 dokumen	18.500.000,00	1 dokumen	50.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		44.000.000,00		217.096.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran OPD yang disusun dengan baik		9.757.500,00	2 dokumen	15.000.000,00	2 dokumen	9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		63.757.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun dengan baik		19.659.500,00	3 dokumen	63.000.000,00	1 dokumen	46.218.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		263.877.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan RKA dan DPA	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun dengan baik		52.370.500,00	4 dokumen	66.860.500,00	4 dokumen	29.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		238.231.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan SAKIP	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun dengan baik			1 dokumen	20.200.000,00										20.200.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	jumlah laporan realisasi fisik dan keuangan yang disusun			12 dokumen	21.000.000,00										21.000.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan Renstra SKPD	jumlah dokumen renstra PD yang selaras dgn RPJMD			1 dokumen	21.000.000,00										21.000.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang SKPD	jumlah laporan inventarisasi Barang OPD yang disusun								20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		60.000.000,00		
Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen renja PD yang selaras dgn RKPD								34.900.000,00		34.900.000,00		34.900.000,00		104.700.000,00		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD			
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan								1.513.000.000,00		1.113.000.000,00		1.113.000.000,00		3.739.000.000,00		
															0,00		
Program penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah		23.377.000,00	85%	689.325.317,00	85%	1.016.489.500,00								1.729.191.817,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan RENSTRA SKPD	jumlah dokumen renstra PD yang selaras dgn RPJMD		13.333.500,00	-	0,00										13.333.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan Renja SKPD	jumlah dokumen renja PD yang selaras dgn RKPD		10.043.500,00	1 dokumen	14.955.000,00		32.000.000,00								56.998.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan			3 kegiatan	674.370.317,00	3 kegiatan	984.489.500,00								1.658.859.817,00		
															0,00		
Program Kerjasama Pembangunan	Prosentase kerjasama pembangunan yang terintegrasi		452.805.900,00	80%	427.231.249,00		0,00								880.037.149,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Fasilitasi Dewan Riset Daerah	jumlah dokumen dewan riset daerah		452.805.900,00	12 Laporan	427.231.249,00										880.037.149,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
															0,00		
Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi	prosentase penyediaan dukungan data / informasi		96.398.000,00	90%	292.559.000,00	90%	64.600.000,00								453.557.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Pengelolaan dan Pemeliharaan Website	prosentase Website yang ter update dan menjadi sarana informasi publik		57.818.500,00	1 website	80.000.000,00	1 website	27.000.000,00								164.818.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyelenggaraan Aplikasi PPID Pembantu	prosentase Aplikasi PPID pembantu yang selaras dengan PPID Utama		38.579.500,00	25 dokumen	119.439.000,00	25 dokumen	37.600.000,00								195.618.500,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	jumlah dokumen buku statistik daerah		0,00	162 buku	93.120.000,00										93.120.000,00		
															0,00		
Program Pelaksanaan Harjaksi	pelaksanaan program harjaksi yang difasilitasi		26.565.000,00	1 kali	19.730.000,00	1 kali	24.100.000,00								70.395.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI)	fasilitasi peringatan hari jadi kabupaten situbondo		26.565.000,00	1 kali	19.730.000,00	1 kali	24.100.000,00								70.395.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
															0,00		
Program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN	Jumlah pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan PHBA dan PHBN yang difasilitasi		22.573.000,00	2 kali	13.530.000,00	2 kali	24.085.000,00								60.188.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Dukungan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama	jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Agama		22.573.000,00	2 kali	13.530.000,00	2 kali	24.085.000,00								60.188.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo
															0,00		
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Prosentase Pengembangan Data / Informasi		1.516.034.620,00		0,00		0,00								1.516.034.620,00	Bappeda	Kab. Situbondo
Fasilitasi Pusat Data Kabupaten	jumlah fasilitasi Pusat data Kabupaten		181.633.600,00	-	0,00										181.633.600,00		
Koordinasi Aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	Jumlah koordinasi SIPD		54.750.000,00	-	0,00										54.750.000,00		
Pemberdayaan Forum Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten	prosentase data yang dicukupi		65.372.500,00	-	0,00										65.372.500,00		
Penyusunan Buku Saku Profil Kabupaten Situbondo	Jumlah dokumen buku saku profil yang disusun		103.357.800,00	-	0,00										103.357.800,00		
Penyusunan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)	Prosentase penduduk miskin yang terdata by name by adress		116.423.000,00	-	0,00										116.423.000,00		
Pelatihan Tim Pendata Kemiskinan Desa	prosentase tim data yang memahami aplikasi data kemiskinan		250.760.000,00	-	0,00										250.760.000,00		
Validasi Basis Data Terpadu Tahun 2015 (Pajak Rokok)	jumlah data pajak rokok tervalidasi		347.198.000,00	-	0,00										347.198.000,00		
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Potensi Desa	jumlah SIM manajemen data potensi desa		191.391.000,00	-	0,00										191.391.000,00		
Pembuatan SIM Kemiskinan Daerah	jumlah SIM kemiskinan daerah		111.402.500,00	-	0,00										111.402.500,00		
Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan		93.746.220,00	-	0,00										93.746.220,00		
															0,00		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	prosentase tata kelola perkotaan yang baik		62.406.500,00	60	140.765.000,00	70	119.250.000,00									322.421.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Facilitasi Kegiatan dari Kementerian Perumahan Rakyat	jumlah fasilitasi kegiatan inpraswil		9.726.500,00	-	0,00											9.726.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD					
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan		52.680.000,00	60%	140.765.000,00	100%	119.250.000,00								312.695.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
															0,00		
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kelembagaan perencanaan pembangunan daerah yang meningkat kapasitasnya		420.074.312,00	50 Orang	442.665.400,00		0,00								862.739.712,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan yang dilaksanakan		26.143.000,00	-	0,00										26.143.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Fasilitasi Aplikasi SIM perencanaan	Jumlah fasilitasi SIM perencanaan yang diadakan		393.931.312,00	1 SIM	442.665.400,00										836.596.712,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
															0,00		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	2 Dokumen	2.478.326.783,00	1 Dokumen	2.166.049.312,00	2 Dokumen	2.609.787.500,00	2 Dokumen	2.158.500.000,00	2 Dokumen	2.158.500.000,00		2.545.361.076,00		14.116.524.671,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perubahan RKPd yang telah ditetapkan dengan Perkada	2 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
	Prosentase PD yang Menyampaikan Laporan Dalev Renja	60%		80%		85%		90%		90%					0,00		
	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target lingkup Bidang Penelitian pengembangan dan perencanaan	80% / 24 PD		82% / 24 PD		85% / 24 PD		90% / 24 PD		95% / 24 PD		100% / 24 PD		100% / 24 PD			
	Prosentase Program RKPd yang konsisten terhadap Program RPJMD Lingkup Bidang Penelitian pengembangan dan perencanaan	75%		80%		85%		90%		95%		100%		100%			
	Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD lingkup Bidang Penelitian pengembangan dan perencanaan	75% / 24 PD		80% / 24 PD		85% / 24 PD		90% / 24 PD		95% / 24 PD		100% / 24 PD		100% / 24 PD			
Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD yang disusun	1 dokumen	468.951.000,00		0,00										468.951.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Asistensi Renstra SKPD	Jumlah OPD yang restranya selaras dengan RPJMD	1 dokumen	164.997.500,00	-	0,00										164.997.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	prosentase dokumen RPJMD yang disepakati bersama	1 dokumen	150.987.500,00	-	0,00										150.987.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penetapan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	1 dokumen	76.505.000,00	-	0,00										76.505.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Asistensi Renja SKPD	prosentase renja OPD yang selaras dengan dokumen Rkpd	75%	30.535.000,00	-	0,00										30.535.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyusunan rancangan RKPd	prosentase RKPd yang selaras dengan RPJMD	75%	223.450.000,00	80%	597.907.096,00	85%	950.687.500,00	90%	1.377.500.000,00	95%	1.377.500.000,00	100%	1.764.361.076,00	100%	6.291.405.672,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	prosentase usulan musrenbang yang diakomodir di RKPd dan selaras dengan RPJMD	75%	155.504.221,00	80%	139.489.600,00	85%	92.550.000,00	90%		95%		100%		100%	387.543.821,00		
Penyusunan RKPd Perubahan	Prosentase RKPd perubahan yang selaras dengan RPJMD	75%	174.333.000,00	80%	0,00	85%		90%		95%		100%		1,00	174.333.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penetapan RKPd	Jumlah dokumen RKPd yang ditetapkan	1 dokumen	62.270.000,00	1 Dokumen	522.672.750,00			1 Dokumen							584.942.750,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPI) Kepala Daerah TA. 2015	Jumlah dokumen LKPI yang disusun	1 dokumen	226.495.000,00	-	0,00										226.495.000,00		
Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kabupaten	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	164.608.500,00	2 Dokumen	339.483.000,00										504.091.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
			TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten	Jumlah dokumen KUA dan PPAS perubahan yang disusun	1 dokumen	164.963.266,00	-	0,00											164.963.266,00		
Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Bantuan Keuangan	Jumlah koordinasi dan monitoring bantuan keuangan	4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	97.293.000,00	4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	106.814.000,00			4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	191.000.000,00	4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	191.000.000,00	4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	191.000.000,00	4 koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan	777.107.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	17 kecamatan	30.635.000,00	17 kecamatan	37.920.000,00	17 kecamatan	34.600.000,00	17 kecamatan	75.000.000,00	17 kecamatan	75.000.000,00	17 kecamatan	75.000.000,00	17 kecamatan	328.155.000,00	BAPPEDA		
Pengendalian dan Evaluasi RKPD dan Renja SKPD	Prosentase dokumen RKPD dan Renja OPD yang selaras	75%	59.555.574,00	80%	74.901.750,00	85%	131.100.000,00	90%	190.000.000,00	95%	190.000.000,00	100%	190.000.000,00	1,00	835.557.324,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Koordinasi Penyelenggaraan Pelaporan Tugas Pembantuan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	8 koordinasi	39.825.000,00	-	0,00										39.825.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi di Lingkup Bidang Pendataan	Jumlah Koordinasi perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang menunjang tugas di Lingkup Bidang Pendataan	8 koordinasi	58.624.000,00	8 koordinasi	187.678.606,00	8 koordinasi	272.650.000,00								518.952.606,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Kegiatan DAK	Jumlah Koordinasi dan Monitoring yang dilaksanakan	8 koordinasi	128.794.222,00	8 koordinasi	159.182.510,00	8 koordinasi	72.600.000,00	8 koordinasi	75.000.000,00	8 koordinasi	75.000.000,00	8 koordinasi	75.000.000,00	8 koordinasi	585.576.732,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Review RPJMD	Prosentase RPJMD yang selaras dengan Renstra Seluruh OPD					85%	841.600.000,00								841.600.000,00			
Fasilitasi Aplikasi SIM Perencanaan	Jumlah fasilitasi Aplikasi SIM Perencanaan						8 fasilitasi	214.000.000,00	8 fasilitasi	250.000.000,00	8 fasilitasi	250.000.000,00	8 fasilitasi	250.000.000,00	964.000.000,00			
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	80 % / 8 PD	2.097.227.547,00	82 % / 8 PD	1.633.303.402,00	85 % / 8 PD	1.712.873.000,00	90 % / 8 PD	1.519.000.000,00	95 % / 8 PD	1.418.000.000,00	100 % / 8 PD	1.418.000.000,00	100 % / 8 PD	9.798.403.949,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
	Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD Lingkup Bidang Ekonomi	75%		80%		85%		90%		95%		100%		100%	0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
	Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	75 % / 8 PD		80 % / 8 PD		85 % / 8 PD		90 % / 8 PD		95 % / 8 PD		100 % / 8 PD		100 % / 8 PD	0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Metigasi Pemetaan Rawan Bencana di Kabupaten Situbondo	Jumlah Dokumen kawasan rawan bencana di kabupaten situbondo	1 Dokumen	141.376.000,00	-	0,00										141.376.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Penyusunan Profil daya saing potensi dan ekonomi Kabupaten Situbondo	Jumlah Dokumen Profil daya saing potensi dan ekonomi Kabupaten Situbondo	1 Dokumen	139.568.750,00	-	0,00										139.568.750,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Penyusunan Review Masterplan Pengembangan Pertanian Terpadu dan Wisata Pathek Di Desa Gelung Kecamatan Panarukan	Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Pertanian Terpadu dan Wisata Pathek Di Desa Gelung Kecamatan Panarukan	1 Dokumen	148.558.500,00	-	0,00										148.558.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Inventarisasi Sebaran Potensi Tembakau pada kabupaten Situbondo	Jumlah Dokumen Sebaran Potensi Tembakau pada kabupaten Situbondo	1 Dokumen	61.451.000,00	-	0,00										61.451.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Fasilitasi dan Koordinasi Pembiayaan infrastruktur Kerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Badan Usaha	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi Pembiayaan Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Badan Usaha	8 koordinasi	41.648.264,00	-	0,00										41.648.264,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti Poverty Program (APP)	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Anti Poverty Program (APP)	8 koordinasi	310.600.000,00	8 koordinasi	254.961.000,00	8 koordinasi	197.460.000,00	8 koordinasi	200.000.000,00	8 koordinasi	200.000.000,00	8 koordinasi	200.000.000,00	8 koordinasi	1.363.021.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Review Masterplan Agropolitan	Jumlah dokumen masterplan Agropolitan yang disempurnakan	1 dokumen	123.528.050,00	-	0,00										123.528.050,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Fasilitasi dan Koordinasi Hibah Bansos dan Ekpo pembangunan daerah tertinggal	jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	8 koordinasi	85.244.482,00	-	0,00										85.244.482,00			
Akselerasi Inovasi Teknologi Pasca panen berbasis komoditas kopi	jumlah dokumen Akselerasi Inovasi Teknologi Pasca panen berbasis komoditas kopi	1 dokumen	62.840.000,00	-	0,00										62.840.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Kajian nilai tambah komoditas - komoditas pada kawasan Agropolitan untuk peningkatan pendapatan masyarakat	jumlah dokumen Kajian nilai tambah komoditas -komoditas pada kawasan Agropolitan untuk peningkatan pendapatan masyarakat	1 dokumen	125.620.750,00	-	0,00										125.620.750,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Pengembangan Industrialisasi Kerapu di Kabupaten Situbondo	jumlah dokumen Pengembangan Industrialisasi Kerapu di Kabupaten Situbondo	1 dokumen	64.940.000,00	-	0,00										64.940.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan	jumlah dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Agropolitan	1 dokumen	55.422.000,00	1 dokumen	63.220.500,00	1 dokumen	87.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	295.642.500,00			

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD							
		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
Peranan BUMDES dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan berbasis potensi wilayah di kabupaten situbondo	Jumlah dokumen Peranan BUMDES dalam mewujudkan kemandirian ekonomi perdesaan berbasis potensi wilayah di kabupaten situbondo	1 Dokumen	49.748.000,00	-	0,00														
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	40 koordinasi	101.940.251,00	40 koordinasi	343.688.285,00	40 koordinasi	211.291.000,00	40 koordinasi	390.000.000,00	40 koordinasi	390.000.000,00	40 koordinasi	390.000.000,00	40 koordinasi	1.826.919.536,00				
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	jumlah dokumen Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	316.682.000,00	1 dokumen	652.050.000,00	1 dokumen	276.000.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	175.000.000,00	1 dokumen	1.594.732.000,00				
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilaksanakan	20 koordinasi	246.632.000,00	20 koordinasi	198.850.617,00	20 koordinasi	91.455.000,00	20 koordinasi	135.000.000,00	20 koordinasi	135.000.000,00	20 koordinasi	135.000.000,00	20 koordinasi	941.937.617,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program pembangunan ekonomi	jumlah dokumen Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program pembangunan ekonomi	1 dokumen		1 dokumen	12.355.000,00	1 dokumen	69.300.000,00	1 dokumen	62.000.000,00	1 dokumen	62.000.000,00	1 dokumen	62.000.000,00	1 dokumen	267.655.000,00				
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	jumlah dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI)	1 dokumen		1 dokumen	383.546.000,00	1 dokumen	370.473.000,00	1 dokumen	390.000.000,00	1 dokumen	390.000.000,00	1 dokumen	390.000.000,00	1 dokumen	1.924.019.000,00				
Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi SNV	jumlah dokumen Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi SNV		0,00	-	0,00										0,00				
Penujng Operasional UPTB Gedung Puspemas	jumlah dokumen Penujng Operasional UPTB Gedung Puspemas	1 dokumen	82.211.000,00	-	0,00										82.211.000,00				
Fasilitasi Koordinasi dan monitoring Poverty Solution Program (PSP)	jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi dan monitoring Poverty Solution Program (PSP)	1 dokumen	39.513.000,00	-	0,00										39.513.000,00				
Pembinaan penguatan Pokmas pada Daerah Tertinggal	jumlah dokumen Pembinaan penguatan Pokmas pada Daerah Tertinggal	1 dokumen	26.651.000,00	-	0,00										26.651.000,00				
koordinasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)	jumlah dokumen koordinasi dan monitoring Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)	1 dokumen	189.734.500,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	33.844.000,00	1 dokumen	36.000.000,00	1 dokumen	36.000.000,00	1 dokumen	36.000.000,00	1 dokumen	391.578.500,00				
Program Perencanaan Sosial Budaya	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	80 %/ 12 PD	1.189.799.141,00	82 %/ 12 PD	1.582.984.879,00	85 %/ 9 PD	1.942.499.200,00	90 %/ 9 PD	2.988.000.000,00	95 %/ 9 PD	1.558.000.000,00	100 %/ 9 PD	1.558.000.000,00	100 %/ 9 PD	10.819.283.220,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
	Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD Lingkup Bidang Sosbud	75%		80%		85%		90%		95%		100%		100%	0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
	Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	75%/ 12 PD		80%/ 12 PD		85 %/ 12 PD		90% / 12 PD		95%/ 12 PD		100 %/ 12 PD		100 %/ 12 PD	0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Penyusunan Masterplan Pembangunan Puskesmas Widoropayung - Kecamatan Besuki	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun	1 dokumen	49.964.550,00	-	0,00										49.964.550,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Penyusunan Masterplan Pembangunan Puskesmas Pembantu Wonorejo UPTD Puskesmas Banyuputih - Kecamatan Banyuputih	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun	1 dokumen	49.964.550,00	-	0,00										49.964.550,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Penyusunan Masterplan Pembangunan Puskesmas Pembantu UGD Klampokan - Kecamatan Panji	Jumlah Dokumen Masterplan yang disusun	1 dokumen	49.964.550,00	-	0,00										49.964.550,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	jumlah koordinasi perencanaan bidang Sosial Budaya	30 koordinasi	148.361.057,00	30 koordinasi	816.699.489,00	30 koordinasi	1.048.825.700,00	30 koordinasi	540.000.000,00	30 koordinasi	340.000.000,00	30 koordinasi	340.000.000,00	30 koordinasi	3.233.886.246,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan kabupaten situbondo	jumlah koordinasi dan kemiskinan kabupaten situbondo	20 koordinasi	229.773.005,00	-	0,00			30 koordinasi	1.168.000.000,00	30 koordinasi	368.000.000,00	30 koordinasi	368.000.000,00	30 koordinasi	2.133.773.005,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
koordinasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	jumlah koordinasi dan hak gender PUG dan pengarusutamaan hak anak PUHA	20 koordinasi	58.364.000,00	-	0,00										58.364.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan (TSP)	jumlah koordinasi dan sosial tanggungjawab sosial perusahaan (TSP)	20 koordinasi	51.713.500,00	-	0,00										51.713.500,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo		

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal	Jumlah fasilitasi dan pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal	10 fasilitasi	71.612.495,00	-	0,00											71.612.495,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penelitian Anggaran Berbasis Ketersediaan Lapangan Kerja	Jumlah penelitian anggaran ketersediaan Lapangan Kerja	1 dokumen	49.789.650,00	-	0,00											49.789.650,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyusunan masterplan akademi komunitas situbondo	Jumlah penyusunan masterplan akademi situbondo	1 dokumen	146.328.000,00	-	0,00											146.328.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Kajian Kebijakan Pemerintah dalam Membangun Desa	Jumlah kajian kebijakan dalam Membangun Desa	1 dokumen	178.265.758,00	-	0,00											178.265.758,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	Jumlah koordinasi dan rpjmdes RPJMDes dan RKPDes	20 koordinasi	59.880.000,00	20 koordinasi	75.000.000,00											134.880.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)	Jumlah koordinasi dan permukiman Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas PLPBK dan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman P2KKP	20 koordinasi	45.818.026,00	-	0,00											45.818.026,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu-isu strategis dan strategi program pembangunan sosial budaya	Jumlah penyusunan inventarisasi pembangunan isu-isu strategis dan strategi program pembangunan sosial budaya			-	0,00	1 dokumen	80.000.000,00									80.000.000,00		
Penguatan Kelembagaan Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP)	prosentase masyarakat miskin terdata by name by adress di kabupaten situbondo			90%	513.042.800,00	95%	448.410.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%		2.611.452.800,00		
Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	Jumlah sistem informasi berbasis Masyarakat SIPBM			1 sim SIPBM	29.999.790,00											29.999.790,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah penyusunan masterplan penyusunan			1 dokumen	148.242.800,00	1 dokumen	52.300.000,00									200.542.800,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sosial Budaya	Jumlah penyusunan dokumen bidang Bidang Sosial Budaya					1 dokumen	312.963.500,00	1 dokumen	730.000.000,00	1 dokumen	300.000.000,00	1 dokumen	300.000.000,00	1 dokumen		1.642.963.500,00		
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	7 PD	1.014.768.021,00	7 PD	2.056.615.056,00	7 PD	1.216.428.000,00		1.447.500.000,00		1.225.000.000,00		1.225.000.000,00			8.185.311.077,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo
	Prosentase Program RKPd yang konsisten terhadap Program RPJMD lingkup Bidang Inpraswil	75%		80%		85%		90%		95%		100%		100%		0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi	
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	75% / 7 PD		80% / 7 PD		85% / 7 PD		90% / 7 PD		95% / 7 PD		100% / 7 PD		100% / 7 PD	0,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Kajian Pengembangan Jaringan Infrastruktur Jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Jaringan Infrastruktur Jalan Kabupaten	1 dokumen	238.982.400,00	-	0,00										238.982.400,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Analisis Pembiayaan Sektor Ekonomi dan Pembangunan untuk mendorong akselerasi terwujudnya Smart Society di Kabupaten Situbondo	Jumlah Dokumen Analisis Pembiayaan Sektor Ekonomi dan Pembangunan untuk mendorong akselerasi terwujudnya Smart Society di Kabupaten Situbondo	1 dokumen	49.764.000,00	-	0,00										49.764.000,00	Bappeda	Kabupaten Situbondo	
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (JAKSTRADA SPAM)	1 dokumen	117.450.000,00	-	0,00										117.450.000,00	Bappeda	Kabupaten Situbondo	
Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Air Limbah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Masterplan Penanganan Air Limbah	1 dokumen	127.588.660,00	-	0,00										127.588.660,00	Bappeda	Kabupaten Situbondo	
Penyusunan Dokumen Masterplan Drainase	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Masterplan Drainase	1 dokumen	135.980.000,00	-	0,00										135.980.000,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Program WISMP 2 (Loan WISMP)	Jumlah Dokumen Program WISMP 2 (Loan WISMP)	1 dokumen	167.281.121,00	-	0,00										167.281.121,00			
Dukungan Penyelenggaraan Komisi Irigasi	Jumlah Dokumen Dukungan Penyelenggaraan Komisi Irigasi	1 dokumen	38.478.000,00	-	0,00										38.478.000,00	Bappeda	Kab. Situbondo	
Pendampingan dan Penunjang WISMP 2	Jumlah Dokumen Pendampingan dan Penunjang WISMP 2	1 dokumen	67.199.000,00	-	0,00										67.199.000,00			
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah			1.173.347.750,00		662.104.000,00		517.500.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00			3.072.951.750,00			
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	1 dokumen	72.044.840,00		513.654.050,00		246.174.000,00		580.000.000,00		515.000.000,00		515.000.000,00		2.441.872.890,00	BAPPEDA	Kabupaten Situbondo	
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup			30 koordinasi	323.498.256,00		30 koordinasi	51.500.000,00							374.998.256,00			
Penyusunan Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang			1 dokumen	46.115.000,00		1 dokumen	100.000.000,00							146.115.000,00			
Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Penyusunan Inventarisasi permasalahan, perumusan isu -isu strategis dan strategi program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam				0,00		1 dokumen	156.650.000,00		1 dokumen	350.000.000,00		1 dokumen	350.000.000,00	1 dokumen	1.206.650.000,00		
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	prosentase Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan yang mengerti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai						90%	371.000.000,00		95%	315.896.000,00		100%	315.896.000,00	100%	315.896.000,00		1.318.688.000,00
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan melalui Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai dan Pemberantasan BKC	prosentase Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan yang mengerti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai						90%	250.000.000,00		95%	165.896.000,00		100%	165.896.000,00	100%	165.896.000,00		747.688.000,00

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra (Tahun 2016)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra SKD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah fasilitasi dan money yang dilakukan					30 Fasilitasi	121.000.000,00	30 Fasilitasi	150.000.000,00	30 Fasilitasi	150.000.000,00	30 Fasilitasi	150.000.000,00	30 Fasilitasi	150.000.000,00		
															0,00		
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Prosentase Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal					90%	52.000.000,00		0,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	152.000.000,00		
Pengumpulan Informasi hsl Tembakau yg tdk Dilekati Pita Cukai & Dilekati Pita Palsu dipederaran/Tempat Penjualan Eceran mlil Pendataan Informasi Tembakau dipederaran/tmp penjual eceran	Jumlah Informasi yang didapatkan dari Pengumpulan Informasi hsl Tembakau yg tdk Dilekati Pita Cukai & Dilekati Pita Palsu dipederaran/Tempat Penjualan Eceran mlil Pendataan Informasi Tembakau dipederaran/tmp penjual eceran					30 informasi	52.000.000,00		0,00	30 informasi	50.000.000,00	30 informasi	50.000.000,00	30 informasi	152.000.000,00		
															0,00		
Program Penelitian Dan Pengembangan	Prosentase Penelitian/kajian yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan	75%		80%	400.016.700,00	85%	353.925.000,00	90%	450.000.000,00	95%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	1.703.941.700,00		
Kajian/Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Jumlah Kajian / Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang disusun untuk mengakomodir permasalahan pelaksanaan pembangunan			4 dokumen	189.837.200,00	4 dokumen	353.925.000,00	6 dokumen	450.000.000,00	6 dokumen	250.000.000,00	6 dokumen	250.000.000,00	6 dokumen	1.493.762.200,00		
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Potensi Desa	Jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data Potensi Desa			1 SIM	210.179.500,00		0,00								210.179.500,00		
															0,00		
			8.873.980.936,00		10.701.850.370,00		12.382.535.000,00		13.363.796.000,00		10.976.311.000,00		11.363.172.076,00		67.661.645.382,00		

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681127 198903 1 007

